

PELAYANAN KREDIT NON FORMAL DI PEDESAAN SULAWESI SELATAN

Bambang Irawan*

Abstract

Credit service is one of main factors in rural economic development especially for agricultural sector. This paper has shown that many farm households took credit which indicates the need of credit services. Generally farmers use their loans for productive activities. Most of the farmers borrowed farm inputs and this kind of loan tended to be higher in irrigated area. Informal credit services which served by traders or rice miller are more common than formal credit institutions such as KUD and BRI Unit Desa. These informal credit services were generally used more by small farmers eventhough the interest rate is much higher compared to that of formal credit. The involvement of farmers on informal credit also tended to be higher in remote areas where KUD's credit service does not exist. Therefore, to help farmer's on capital need, the role of KUD on rural credit need to be strengthened. For this purpose, the service of KUD need to be accesable by rural population. Moreover, the possibility of returning KUT credit in kind (agricultural produce) warrants further consideration.

Abstrak

Pelayanan kredit merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi di pedesaan khususnya pada sektor pertanian. Dalam tulisan ini terungkap bahwa cukup banyak rumah tangga tani yang terlibat dengan peminjaman kredit yang menandakan bahwa kehadiran lembaga pelayanan tersebut memang dibutuhkan petani. Pada umumnya peminjaman tersebut dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Sebagian besar petani melakukan pinjaman dalam bentuk sarana produksi dan di daerah sawah peminjaman tersebut cenderung lebih banyak terjadi. Dibandingkan dengan lembaga kredit formal seperti KUD dan BRI Unit Desa, pelayanan kredit non formal yang umumnya dilakukan oleh pedagang atau pemilik penggilingan padi ternyata lebih berperan. Ada kecenderungan pelayanan kredit non formal tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh petani berlahan sempit meskipun tingkat bunga yang berlaku jauh lebih tinggi dibandingkan pada lembaga kredit formal. Di daerah-daerah dengan assesibilitas rendah dan belum terjangkau oleh pelayanan KUD keterlibatan petani dengan pemberi kredit non formal tersebut juga cenderung lebih tinggi. Oleh karena itu guna meringankan beban petani, peranan KUD dalam pelayanan kredit pedesaan dituntut lebih jauh. Dalam hal ini perpanjangan tangan KUD di desa-desa sangat diperlukan dan demikian pula kajian tentang kemungkinan pengembalian kredit KUT dalam bentuk hasil produksi perlu dilakukan.

* Staf Peneliti Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan disektor pertanian, keberhasilan yang telah dicapai selama ini juga tidak terlepas dari berbagai upaya peningkatan pelayanan kredit yang diprogramkan pemerintah. Peningkatan produksi berbagai komoditas pertanian dapat dikatakan berjalan searah dengan perkembangan teknologi usahatani yang didukung dengan peningkatan pelayanan kredit. Berkembangnya pelayanan kredit di pedesaan menyebabkan ketersediaan modal yang seringkali menjadi kendala bagi petani dalam proses adopsi teknologi baru dapat ditanggulangi. Pada gilirannya hal ini membawa dampak positif terhadap peningkatan produktivitas usahatani dan juga pendapatan petani.

Di sektor pertanian, terobosan dalam peningkatan pelayanan kredit sarana produksi diawali dengan dicetuskannya program Bimas padi. Antara tahun 1970 hingga 1978 luas areal dan jumlah petani peserta Bimas meningkat sekitar dua kali lipat dan bersamaan dengan itu produksi beras meningkat rata-rata 3,6 persen per tahun (Tatuh, 1986). Namun sejak tahun 1977 jumlah petani peserta Bimas mulai menunjukkan penurunan. Hal ini antara lain karena petani telah meraih manfaat teknologi baru yang diperkenalkan melalui program tersebut sehingga memungkinkan bagi petani untuk membiayai sendiri sarana produksi modern yang dibutuhkan seperti pupuk dan obat-obatan (Kasryno, 1984).

Uraian di atas pada hakekatnya memperlihatkan bahwa pelayanan fasilitas kredit merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan disektor pertanian. Menyadari hal tersebut berbagai fasilitas kredit telah dikembangkan pemerintah guna menunjang pembangunan ekonomi di daerah pedesaan. Pelayanan fasilitas kredit dengan suku bunga rendah tidak hanya pada sektor pertanian tetapi juga pada sektor-sektor ekonomi lainnya namun tetap masih diprioritaskan untuk golongan ekonomi lemah. Untuk kegiatan di sektor pertanian pelayanan kredit yang populer akhir-akhir ini adalah Kredit Usaha Tani (KUT) yang pada dasarnya merupakan pengganti kredit Bimas. Sedangkan untuk sektor perdagangan dan industri rumah tangga Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) yang muncul pertama kali pada tahun 1970-an juga semakin digalakkan akhir-akhir ini.

Untuk memperluas jangkauan pelayanan kredit di daerah pedesaan KUD dan BRI Unit Desa sangat diandalkan sebagai ujung tombak. Penyaluran kredit dengan bunga rendah disalurkan pada petani dan masyarakat desa lainnya melalui kedua lembaga tersebut. Namun berbagai penelitian seringkali mengungkapkan bahwa pelayanan kredit yang diberikan oleh kedua lembaga tersebut masih cukup rendah akibat berbagai masalah baik yang bersifat struktural maupun interen pada masing-masing lembaga. Keadaan demikian lebih lanjut seringkali disinyalir menyebabkan petani banyak yang terlibat pada lembaga kredit non formal.

Persoalannya kemudian adalah sejauh mana keterlibatan petani dalam pinjaman kredit pada lembaga kredit non formal dan apakah sistem perkreditan yang berlaku tidak begitu membebani petani. Keadaan tersebut tentu akan sangat bervariasi di setiap daerah. Tulisan ini mencoba mengungkapkannya khususnya untuk daerah pedesaan di Propinsi Sulawesi Selatan. Tiga masalah utama yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah: (1) mengidentifikasi jenis lembaga dan sistem perkreditan pada lembaga kredit non formal, (2) mengkaji sejauh mana keterlibatan petani dalam aktivitas perkreditan dan (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keterlibatan petani dengan lembaga perkreditan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Salah satu ciri utama dari kegiatan di sektor pertanian yang banyak digeluti oleh penduduk di pedesaan adalah memiliki tenggang waktu yang relatif lama antara saat tanam hingga saat panen. Keadaan demikian menyebabkan pendapatan rumah tangga tani di pedesaan pada umumnya bersifat musiman. Seberapa jauh siklus pendapatan yang diperoleh banyak ditentukan oleh jenis tanaman yang diusahakan. Namun karena pemilikan lahan yang relatif sempit, pola pendapatan yang bersifat musiman tersebut seringkali menyebabkan petani dihadapkan pada keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama selama masa paceklik (Mubyarto, 1987).

Guna menutupi kesenjangan antara pola pendapatan yang bersifat musiman dan kebutuhan rumah tangga yang bersifat kontinyu, petani seringkali terdorong untuk melakukan diversifikasi sumber pendapatan. Suatu alternatif yang biasanya dilakukan petani berlahan sempit adalah dengan melakukan kegiatan di luar usahatani. Kegiatan yang dilakukan umumnya berburuh dengan berproduktivitas rendah. Namun demikian, tidak selamanya kegiatan tersebut dapat dilakukan petani baik karena faktor petani sendiri maupun akibat kesempatan kerja yang terbatas. Pada golongan petani ini cukup banyak yang hanya dapat mengandalkan pada uang pinjaman untuk keperluan konsumsi maupun kegiatan produksi seperti biaya untuk pengolahan tanah dan pengadaan sarana produksi (Mubyarto, 1987).

Berbagai jenis kredit dengan bunga rendah, sebenarnya telah cukup banyak disalurkan pemerintah guna membantu petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Akan tetapi seringkali diungkapkan bahwa penyaluran kredit tersebut belum mampu menjangkau sebagian besar lapisan masyarakat desa. Misalnya saja untuk kredit yang disalurkan melalui KUD data Sensus Pertanian 1983 menunjukkan bahwa pemanfaatannya ternyata justru cenderung lebih banyak dilakukan oleh golongan penduduk yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik (Satari,

1986). Hal ini antara lain karena golongan penduduk tersebut memiliki sikap tanggap yang lebih baik (PAE 1987). Ini menandakan bahwa diterima tidaknya suatu lembaga perkreditan akan ditentukan pula oleh respon yang diberikan masyarakat dan dalam hal ini karakteristik sosial yang dimiliki oleh individu petani sudah barang tentu akan berperan.

Sementara itu, bagi golongan penduduk berpendapatan rendah lembaga kredit non formal masih tetap menjadi tumpuan harapan meskipun tingkat bunga yang dikenakan pada umumnya cukup tinggi (Mubyarto, 1987). Secara logika, tingkat bunga kredit merupakan salah satu faktor penentu bagi calon peminjam dalam menentukan sumber pinjaman yang akan digunakan. Namun bagi masyarakat pedesaan tingkat bunga tersebut tidak selalu merupakan ukuran yang penting dalam melakukan pinjaman (Mubyarto, 1987). Yang lebih penting adalah apakah calon peminjam memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman yang dilakukannya. Apabila kemampuan itu ada, maka ia tidak akan begitu memperhatikan lagi berapa bunga yang harus dibayarkan selama kredit yang memang diperlukan dapat diperoleh secara cepat, mudah dan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Pada umumnya ada empat kondisi yang dibutuhkan masyarakat desa dalam pelayanan kredit yaitu mudah, murah, cepat dan sesuai dengan kebutuhan petani. Dari segi tingkat bunga, kredit yang disalurkan pemerintah sudah barang tentu lebih rendah dibandingkan kredit non formal karena penyaluran kredit tersebut pada hakekatnya memang lebih ditujukan untuk membantu masyarakat desa. Akan tetapi dari segi kemudahan, kecepatan dan kesesuaian jenis kredit yang disalurkan, lembaga kredit non formal seringkali justru lebih unggul. Hal ini antara lain karena aktivitas perkreditan non formal biasanya dilakukan oleh perseorangan yang memiliki hubungan sosial lebih dekat dengan masyarakat desa (PPU Sam Ratulangi, 1987). Sementara pada sisi lain lembaga penyaluran kredit formal seperti KUD umumnya hanya berlokasi di pusat-pusat kecamatan dan kredit yang disalurkan juga menuntut persyaratan teknis bank serta proses administrasi yang cukup rumit bagi masyarakat pedesaan.

Keadaan seperti disebutkan di atas, menyebabkan kredit formal yang disalurkan pemerintah seringkali disinyalir memiliki biaya transaksi riil yang relatif tinggi dibandingkan kredit non formal. Hal ini semakin diperburuk pula oleh kenyataan bahwa penyaluran kredit yang dilakukan pemerintah tersebut seringkali dikaitkan dengan pengembangan sektoral. Pada gilirannya keadaan demikian menyebabkan peluang untuk mendapatkan kredit murah tersebut akan bervariasi antar daerah atau rumah tangga tani. Daerah-daerah yang merupakan sasaran pengembangan sektoral sudah barang tentu berpeluang lebih besar untuk mendapatkan kredit pengembangan sektor yang bersangkutan dibandingkan daerah-daerah lainnya.

METODA ANALISIS

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan dua pendekatan yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif yang didukung dengan penyajian tabel-tabel khususnya digunakan dalam mengungkapkan keragaan kredit non formal dan keterlibatan rumah tangga tani dengan aktivitas perkreditan secara umum. Pengungkapan keragaan kredit non formal dilakukan secara spesifik untuk setiap desa karena aktivitas perkreditan non formal tersebut biasanya berkaitan erat dengan karakteristik desa yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengkajian keterlibatan rumah tangga tani dengan lembaga perkreditan dilakukan agregasi berdasarkan tipe agro ekosistem guna melihat pengaruhnya terhadap aspek-aspek yang diamati.

Penggunaan metoda analisis kuantitatif khususnya dilakukan dalam pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi petani untuk melakukan pinjaman pada lembaga perkreditan. Dalam garis besar faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap aktivitas perkreditan yang dilakukan petani terbagi atas variabel-variabel yang mencerminkan karakteristik individu petani dan kondisi daerah lokasi petani. Pada kajian ini analisis dilakukan dengan menggunakan model fungsi logit yang merupakan salah satu bentuk model regresi dengan data kualitatif pada peubah tak bebas. Secara umum model fungsi logit yang digunakan memiliki bentuk persamaan sebagai berikut :

$$P (y=1) = \frac{1}{1 + e^{-(\alpha + \beta_j X_j)}} \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

- y = 1 untuk petani yang melakukan pinjaman kredit dan 0 untuk petani lainnya.
- P (y=1) = peluang petani untuk melakukan pinjaman kredit.
- X_j = variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap petani untuk melakukan pinjaman kredit.
- e = epsilon

Dalam bentuk logaritma, persamaan (1) dapat pula ditulis sebagai :

$$\ln \left(\frac{P}{1-P} \right) = \alpha + \beta_j X_j \dots\dots\dots (2)$$

Dengan demikian berdasarkan persamaan (2) dapat dideteksi seberapa jauh pengaruh perubahan variabel kontinyu terhadap peluang petani untuk melakukan pinjaman dengan menurunkan elastisitas peluang variabel yang bersangkutan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Ep.x_j &= \frac{\partial P}{\partial X_j} \cdot \frac{X_j}{P} = \frac{1}{\partial X_j / \partial P} \cdot \frac{X_j}{P} \\
 &= \beta_j (1 - P) X_j \dots\dots\dots (3)
 \end{aligned}$$

Ep.Xj = elastisitas peluang p(y=1) terhadap variabel Xj.

Dalam penelitian ini variabel-variabel kontinu yang dimasukkan didalam model adalah umur petani (X₁), pendidikan (X₂), nilai pemilikan asset (X₃) dan proporsi pendapatan usahatani terhadap total pendapatan rumah tangga (X₄). Variabel X₁ dan X₂ diduga akan mempengaruhi petani dalam melakukan pinjaman melalui pengaruhnya terhadap sikap tanggap atau respon petani terhadap lembaga perkreditan. Variabel X₃ diduga akan memberikan pengaruh negatif karena pada hakekatnya variabel tersebut mencerminkan tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Sedangkan variabel X₄ yang menggambarkan ketergantungan petani terhadap pendapatan dari hasil usahatani diduga akan memiliki pengaruh positif.

Variabel-variabel dummy yang dimasukkan didalam model adalah kesertaan petani dalam KUD (Dk), tipe agroekosistem dan aksesibilitas lokasi petani. Untuk variabel tipe agroekosistem daerah penelitian dibagi atas tiga kategori yaitu daerah sawah irigasi (DL₁), daerah sawah tadah hujan (DL₂) dan daerah lahan kering sebagai pembanding. Sedangkan aksesibilitas lokasi petani diukur dari apakah daerah yang bersangkutan dilalui kendaraan umum (DD). Daerah-daerah yang dilalui kendaraan umum (DD = 1) diasumsikan memiliki aksesibilitas yang lebih baik dan sebaiknya untuk daerah lainnya.

D a t a

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan dari petani dan perseorangan yang melakukan aktivitas perkreditan non formal. Lokasi penelitian dilakukan di enam desa contoh dengan tipe agroekosistem yang berbeda yaitu : (1) daerah sawah irigasi, desa Paseno (kabupaten Sidrap) dan Margolembo (kabupaten Luwu); (2) daerah sawah tadah hujan, desa Selli (kabupaten Bone) dan Lowa (kabupaten Wajo) dan (3) daerah lahan kering, desa Ujung (kabupaten Soppeng) dan Baroko (kabupaten Enrekang).

Pada masing-masing desa dipilih secara acak sekitar 45 – 50 responden rumah tangga contoh. Keseluruhan rumah tangga contoh di masing-masing desa tersebar dalam salah satu dukuh yang spesifik menggambarkan tipe agroekosistem di desa yang bersangkutan. Sedangkan contoh perseorangan yang melakukan aktivitas perkreditan non formal dipilih secara purposive antara 3–4 responden. Pemilihan contoh responden dalam hal ini ditentukan berdasarkan peranannya dalam aktivitas pemberian kredit kepada masyarakat desa dengan mengacu pada informasi yang diperoleh dari perangkat desa.

LEMBAGA KREDIT NON FORMAL DI PEDESAAN SULAWESI SELATAN

Di pedesaan Sulawesi Selatan cukup banyak dijumpai lembaga keuangan non-formal yang memberikan pinjaman kepada penduduk. Lembaga keuangan tersebut biasanya merupakan usaha perseorangan dan bukan merupakan suatu unit organisasi. Pada umumnya kegiatan perkreditan non formal tersebut dilakukan oleh pedagang atau pemilik penggilingan padi khususnya di daerah-daerah produksi padi. Seringkali terjadi pedagang desa yang memberikan pinjaman pada petani sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari pemilik penggilingan padi.

Dalam garis besar, pinjaman kredit yang diberikan oleh pemberi kredit non-formal dapat dibedakan atas kredit dalam bentuk sarana produksi dan non sarana produksi. Yang dimaksud dengan kredit non sarana produksi dalam hal ini dapat berupa peralatan rumah tangga, uang atau dalam bentuk lainnya. Namun pada umumnya peminjaman dalam bentuk uang yang paling sering dilakukan.

Dari ke enam desa penelitian, pemberian kredit dalam bentuk sarana produksi hanya terjadi di lima desa: Margolembo, Paseno, Selli, Lowa dan Ujung (Tabel 1). Sedangkan di desa Baroko yang merupakan daerah produksi sayuran tidak dijumpai lembaga kredit non formal yang memberikan kredit sarana produksi. Dua faktor yang menjadi penyebab kurang berkembangnya kredit non-formal sarana produksi di desa tersebut tampaknya adalah: (1) sarana transportasi ke tempat penjualan sarana produksi di pasar kecamatan cukup baik dan (2) arus penerimaan uang tunai pada petani relatif lebih kontinyu. Petani sayuran di desa Baroko pada umumnya menanam beberapa jenis sayuran dengan pola tumpangsari terutama tanaman kubis, kentang, dan daun bawang. Setiap seminggu sekali petani sayuran biasanya dapat memperoleh uang tunai dari hasil penjualan daun bawang yang diusahakan.

Di desa Baroko, kredit non formal yang dijumpai terutama dalam bentuk kredit uang tunai. Transaksi peminjaman kredit tersebut dilakukan dengan membayar pada saat panen dengan sistem ijon. Peminjaman uang dengan sistem ijon tersebut terutama dilakukan oleh petani yang mengusahakan tanaman kubis dengan pola monokultur. Kecenderungan demikian biasanya dilakukan petani guna menghindari resiko terutama resiko harga. Sifat tanaman kubis yang cepat busuk menyebabkan harga kubis di tingkat petani sangat berfluktuasi dan cenderung turun sangat tajam pada musim panen. Sedangkan pada petani yang mengusahakan tanaman kentang jarang yang meminjam uang dengan sistem ijon karena fluktuasi harga kentang relatif tidak begitu tajam.

Yang cukup menarik, di desa Margolembo yang merupakan daerah produksi padi dengan pengairan irigasi ada juga peminjaman yang dilakukan dalam bentuk jasa penggunaan traktor. Pola demikian biasanya hanya dilakukan oleh pemilik penggilingan padi yang juga memiliki traktor. Sedangkan pada pemilik traktor yang

Tabel 1. Karakteristik lembaga perkreditan non formal di pedesaan Sulawesi Selatan, 1988

Uraian	Desa sawah irigasi		Desa sawah tadah hujan		Desa lahan kering	
	Margo-lembo	Passeno	Selli	Lowa	Ujung	Baroko
1. Rata-rata pengalaman menjalankan usaha kredit (tahun)	8	8	10	8	7	6
2. Sumber modal yang digunakan:						
a. Seluruhnya modal sendiri	—	v	v	v	—	v
b. Sebagian modal pinjaman bank	v	—	—	—	v	—
3. Jumlah peminjam per musim tanam (orang):						
a. pinjaman sarana produksi	60	20	115	30	30	—
b. pinjaman uang	4	—	2	—	3	20
c. pinjaman traktor	15	—	—	—	—	—
d. pinjaman lain	—	—	—	3	—	—
4. Rata-rata volume/nilai yang dipinjamkan:						
a. pinjaman pupuk (ton)	10,0	3,0	20,0	4,0	1,0	—
b. pinjaman uang (Rp 000)	350	—	150	—	200	2500
c. pinjaman traktor (ha)	20	—	—	—	—	—
d. pinjaman lain (Rp 000)	—	—	—	10	—	—
5. Lokasi peminjam (% peminjam):						
a. dalam desa	70	100	70	100	100	80
b. luar desa	30	—	30	—	—	20
6. Kelancaran pengembalian pinjaman (% peminjam):						
a. lancar	80	70	100	60	80	100
b. kurang lancar	20	30	—	35	20	—
c. macet	—	—	—	5	—	—
7. Perkembangan jumlah peminjam:						
a. tetap	v	—	v	—	v	v
b. makin banyak	—	—	—	—	—	—
c. makin sedikit	—	v	—	v	—	—

tidak aktif dalam perdagangan hasil bumi atau sarana produksi pola tersebut sangat jarang dijumpai. Biasanya pemilik traktor hanya menyewakan saja dan dibayar dengan uang tunai sedangkan untuk traktor yang dimiliki oleh pemilik penggilingan padi pembayaran sewa pada umumnya dilakukan setelah panen dan dalam bentuk gabah.

Munculnya penggunaan jasa tenaga traktor dengan pembayaran kredit di desa Margolembo sebenarnya belum lama terjadi. Berkembangnya pembayaran sewa traktor dengan sistem kredit tersebut baru terjadi sejak tahun 1987. Relatif terbatasnya tenaga ternak maupun traktor yang tersedia untuk kegiatan pengolahan tanah di desa Margolembo agaknya merupakan penyebab dari kenyataan tersebut. Diantara keenam desa penelitian di Sulawesi Selatan Desa Margolembo memang lebih dihadapkan pada masalah kekurangan tenaga kerja pengolahan tanah (Soentoro & S. Bahri, 1988). Keadaan demikian agaknya telah merangsang pemilik penggilingan padi untuk menyewakan traktor dengan sistem kredit karena dengan sistem pembayaran tersebut pemilik penggilingan padi tidak hanya memperoleh manfaat dari usaha menyewakan traktor tetapi juga memperoleh bahan baku untuk usaha penggilingannya.

Dalam Tabel 1 dapat dilihat bahwa pengadaan kredit non formal di desa-desa daerah penelitian pada umumnya sudah berlangsung cukup lama. Rata-rata sudah lebih dari lima tahun pedagang hasil bumi, pedagang sarana produksi atau pemilik penggilingan padi memberikan kredit pada petani. Ini menandakan bahwa eksistensi lembaga kredit non formal tersebut memang cukup diperlukan oleh penduduk pedesaan di Sulawesi Selatan. Pada sisi lain usaha menjalankan kredit tersebut agaknya juga memberikan keuntungan yang cukup bagi pemberi kredit tersebut.

Baik dalam jumlah nasabah maupun jumlah pupuk yang dipinjamkan kasus di desa Margolembo dan Selli ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan desa-desa lainnya. Ini menandakan bahwa persaingan antar lembaga non formal maupun dengan lembaga formal di kedua desa tersebut tidak begitu ketat. Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut dapat dilihat dari besarnya tingkat bunga yang berlaku di kedua desa Margolembo dan Selli seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 4. Dibandingkan dengan desa-desa lainnya bunga pinjaman pupuk di desa Margolembo dan Selli jauh lebih tinggi sekitar 10 persen per bulan.

Seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 1 lembaga perkreditan non formal di Sulawesi Selatan pada umumnya tidak begitu dihadapkan pada masalah pengembalian kredit. Lebih dari 80 persen nasabah yang dihadapi setiap pemberi kredit non formal tergolong lancar dalam pengembalian pinjaman. Kenyataan tersebut menandakan bahwa sistem pengembalian kredit yang diterapkan oleh lembaga perkreditan non formal tidak begitu menjadi beban bagi petani sehingga sebagian besar nasabah mampu mengembalikan kredit yang dipinjam. Oleh karena itu kiranya

cukup beralasan apabila responden lembaga perkreditan non formal pada umumnya tidak merasakan adanya kemunduran dalam usaha perkreditan yang dijalankan seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 1. Dari keenam desa penelitian hanya responden lembaga kredit non formal di desa Passeno dan Lowa yang mengungkapkan bahwa jumlah nasabah yang dapat diraih semakin berkurang. Hal ini mungkin terjadi akibat persaingan yang semakin ketat diantara lembaga kredit non formal lainnya di kedua desa tersebut maupun dengan Koperasi Unit Desa yang semakin meningkatkan penyediaan fasilitas Kredit Usaha Tani (KUT) yang disalurkan melalui berbagai program pertanian seperti Program Supra Insus.

SISTEM PERKREDITAN PADA LEMBAGA KREDIT NON FORMAL

Dalam pemberian kredit pada petani sistem yang digunakan oleh lembaga kredit non formal agak bervariasi di setiap desa penelitian. Variasi yang terjadi baik dalam bentuk pengembalian kredit maupun jangka waktu pengembaliannya yang biasanya disesuaikan dengan jenis-jenis komoditas pertanian dominan yang diusahakan di masing-masing desa. Demikian pula pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk yang berbeda pula menurut jenis pinjaman yang diberikan yaitu uang atau sarana produksi. Secara ringkas bentuk pengembalian pinjaman untuk setiap jenis pinjaman uang atau sarana produksi di keenam desa penelitian dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Bentuk pengembalian kredit untuk berbagai jenis pinjaman pada lembaga kredit non formal di Sulawesi Selatan, 1988

Uraian	Bentuk pengembalian					
	Desa sawah irigasi		Desa sawah tadah hujan		Desa lahan kering	
	Margo-lembo	Passeno	Selli	Lowa	Ujung	Baroko
Pupuk	gabah	gabah	gabah	uang	—	—
Bibit	—	—	—	—	tembakau	—
Obat-obatan	uang	uang	—	—	—	—
Jasa traktor	gabah	—	—	—	—	—
Uang	gabah	—	gabah	—	tembakau	kubis

Pada Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa untuk pinjaman dalam bentuk pupuk atau uang pengembalian kredit pada umumnya dilakukan dalam bentuk hasil produksi. Untuk daerah sawah pengembalian pinjaman pupuk umumnya

dalam bentuk gabah sedangkan di desa Ujung atau Baroko dalam bentuk tembakau atau kubis. Pengembalian pinjaman pupuk dalam bentuk uang di daerah sawah hanya terjadi di desa Lowa. Adanya pola pengembalian demikian di desa tersebut terutama karena lembaga kredit non formal yang memberikan pinjaman pupuk pada petani di desa Lowa adalah hanya pedagang sarana produksi. Sedangkan untuk ketiga desa lainnya di daerah lahan sawah usaha perkreditan non formal umumnya dilakukan oleh pemilik penggilingan padi atau pedagang hasil bumi yang seringkali juga merangkap sebagai pedagang sarana produksi.

Berdasarkan Tabel 2 secara umum dapat disimpulkan bahwa di keenam desa penelitian pengembalian kredit dalam bentuk hasil produksi lebih disukai. Pola demikian terjadi untuk berbagai jenis pinjaman namun cenderung lebih berlaku untuk pinjaman yang bernilai lebih tinggi dan sangat dibutuhkan petani seperti pupuk, jasa traktor atau pinjaman uang yang biasanya dilakukan dalam jumlah cukup besar (75 hingga 100 ribu rupiah). Adanya kecenderungan tersebut cukup beralasan mengingat aktivitas perkreditan non formal umumnya dilakukan oleh perseorangan yang juga terlibat dalam perdagangan hasil produksi seperti pemilik penggilingan padi atau pedagang hasil bumi. Dengan demikian, melalui pengembalian kredit dalam bentuk hasil produksi, pemberi kredit non formal tidak hanya memperoleh keuntungan dari jasa, pemberian kredit tetapi juga dari hasil penjualan sarana produksi maupun hasil produksi. Sedangkan bagi pemilik penggilingan padi juga memperoleh keuntungan lain dalam bentuk pemenuhan kapasitas penggilingan yang dimiliki.

Dalam pemberian pinjaman pupuk atau jasa traktor seperti kasus di Margolembo pemberi kredit non formal sebenarnya tidak secara ketat mengharuskan petani membayar dalam bentuk hasil produksi. Petani dapat saja mengembalikan pinjamannya dalam bentuk uang tunai yang dilakukan setelah panen. Tetapi untuk pinjaman yang dibayar dalam bentuk uang tunai tersebut pemberi kredit non formal biasanya mengenakan bunga yang cukup tinggi sekitar 15 – 20 persen per bulan. Pengenaan bunga yang cukup tinggi tersebut sebenarnya cukup beralasan bagi pemberi kredit karena apabila pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang maka keuntungan dari penjualan hasil produksi tidak diperoleh. Namun demikian cara pengembalian dalam bentuk uang tunai tersebut sangat jarang dilakukan petani. Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah karena cara pembayaran tersebut dianggap kurang praktis dan belum tentu besarnya nilai bunga yang harus dibayar menjadi lebih ringan dibandingkan dengan pembayaran pinjaman dalam bentuk hasil produksi.

Pada Tabel 3 dan Tabel 4 diperlihatkan sistem pembayaran pinjaman pada lembaga kredit non formal untuk pinjaman dalam sarana produksi dan uang. Dibandingkan dengan tingkat suku bunga Kredit Usaha Tani yang disalurkan me-

Tabel 3. Sistem perkreditan sarana produksi pada lembaga kredit non formal di pedesaan Sulawesi Selatan, 1988

Uraian	Desa sawah irigasi		Desa sawah tadah hujan		Desa lahan kering	
	Margo-lembo	Passeno	Selli	Lowa	Ujung	Baroko
1. Jangka waktu pengembalian kredit (bulan)	4	4	4	3	6	-
2. Jenis dan jumlah pinjaman:						
a. pupuk (ku)	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
b. bibit (Rp 000)	-	-	-	-	10	-
c. obat-obatan (Rp 000)	2,50	2,50	-	-	-	-
d. jasa traktor (ha)	1,0	-	-	-	-	-
3. Nilai pinjaman (Rp 000)*						
a. pupuk	17,00	17,00	17,00	17,00	-	-
b. bibit	-	-	-	-	10	-
c. obat-obatan	2,50	2,50	-	-	-	-
d. jasa traktor	75,00	-	-	-	-	-
4. Bentuk pengembalian berdasarkan jenis pinjaman :						
a. pupuk	gabah	gabah	gabah	uang	-	-
b. bibit	-	-	-	-	tembakau	-
c. obat-obatan	uang	uang	-	-	-	-
d. jasa traktor	gabah	-	-	-	-	-
5. Jumlah pengembalian setara hasil produksi berdasarkan jenis pinjaman :						
a. pupuk (ku)	1,23	1,00	1,20	-	-	-
b. bibit (kg)	-	-	-	-	1,0	-
c. obat-obatan (Rp 000)	3,13	3,00	-	-	-	-
d. jasa traktor (ku)	5,00	-	-	-	-	-
6. Nilai pengembalian (Rp 000)						
a. pupuk	24,50	20,00	24,00	19,00	-	-
b. bibit	-	-	-	-	15,00	-
c. obat-obatan	3,13	3,00	-	-	-	-
d. jasa traktor	99,60	-	-	-	-	-
7. Tingkat bunga per bulan (%)						
a. pupuk	11,03	4,41	10,29	3,92	-	-
b. bibit	-	-	-	-	8,33	-
c. obat-obatan	6,31	5,00	-	-	-	-
d. jasa traktor	8,20	-	-	-	-	-

*) Berdasarkan harga yang berlaku untuk pembayaran tunai.

Tabel 4. Sistem perkreditan non sarana produksi pada lembaga perkreditan non formal di pedesaan Sulawesi Selatan

U r a i a n	Desa sawah irigasi		Desa sawah tadah hujan		Desa lahan kering	
	Margo-lembo	Passeno	Selli	Lowa	Ujung	Baroko
1. Cara pengembalian kredit:						
a. ijon	—	—	—	—	—	v
b. bayar saat panen	v	—	v	—	v	—
2. Jangka waktu pengembalian kredit (bulan):						
a. 3–4	v	—	v	—	—	—
b. 1–2	v	—	—	—	v	v
3. Bentuk pengembalian	gabah	—	uang + gabah	—	tembakau	kubis
4. Nilai pinjaman (Rp 000)	100	—	100	—	100	100
5. Jumlah pengembalian dalam bentuk uang (Rp 000):						
a. pinjaman 3–4 bulan	—	—	100	—	—	—
b. pinjaman 1–2 bulan	—	—	—	—	—	—
6. Jumlah pengembalian dalam bentuk hasil produksi (ku)						
a. pinjaman 3–4 bulan	8,0	—	2,5	—	9,4*	—
b. pinjaman 1–2 bulan	6,0	—	—	—	—	19,5
7. Nilai pengembalian (Rp 000)						
a. pinjaman 3–4 bulan	119,4	—	—	—	140,3	—
b. pinjaman 1–2 bulan:						
– bentuk uang	—	—	100	—	—	—
– bentuk hasil produksi	159,3	—	49,8	—	—	168,7
– total	159,3	—	149,8	—	—	168,7
8. Bunga per bulan (%):						
a. pinjaman 3–4 bulan	16,9	—	16,6	—	—	—
b. pinjaman 1–2 bulan	19,4	—	—	—	20,2	34,4

*) Kilogram.

lalui Koperasi Unit Desa, besarnya bunga kredit sarana produksi pada lembaga kredit non formal ternyata jauh lebih tinggi. Pada KUT tingkat bunga yang berlaku sebesar 1 persen per bulan. Sedangkan pada lembaga kredit non formal seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 3 tingkat bunga yang berlaku paling tidak sebesar 4 persen per bulan. Tingkat bunga yang paling tinggi untuk peminjaman pupuk terutama di desa Margolembo dan Selli masing-masing sekitar 11 persen dan 10 persen per bulan. Cukup tingginya tingkat bunga yang berlaku di kedua desa tersebut menunjukkan bahwa pengadaan pupuk di kedua desa tersebut relatif langka meskipun sangat dibutuhkan petani sementara persaingan dengan lembaga perkreditan lain relatif tidak begitu ketat.

Dalam peminjaman uang, ada dua sistem pengembalian yang berlaku yaitu dibayar setelah panen dalam bentuk hasil produksi atau sistem ijon. Penerapan sistem ijon khususnya hanya berlaku di desa Baroko yang merupakan daerah sayuran. Perbedaan pokok pada kedua sistem pengembalian tersebut pada dasarnya hanya terletak pada jenis resiko yang ditanggung oleh pemberi kredit. Pada sistem pengembalian dibayar setelah panen, pemberi kredit hanya menanggung resiko harga karena jumlah pengembalian dalam bentuk hasil produksi sudah tertentu untuk setiap jumlah peminjaman uang. Sedangkan pada sistem ijon pemberi kredit juga masih dihadapkan pada resiko produksi disamping resiko harga.

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa tingkat bunga pinjaman uang di desa Baroko paling tinggi dibandingkan di desa lainnya. Ini cukup beralasan mengingat sistem pengembalian pinjaman yang berlaku di desa tersebut adalah sistem ijon yang berarti pemberi kredit dihadapkan pada resiko yang lebih kompleks seperti yang telah diuraikan di muka. Di desa Baroko dimana peminjaman uang biasanya dibayar dengan sistem ijon tingkat bunga yang berlaku sebesar 34,4 persen per bulan sedangkan di desa-desa lainnya berkisar antara 16 persen hingga 20 persen tergantung pada jangka waktu pengembalian pinjaman. Bila dibandingkan dengan tingkat bunga pinjaman sarana produksi seperti yang diungkapkan dalam Tabel 3 terlihat bahwa tingkat bunga pinjaman uang jauh lebih tinggi untuk desa yang sama. Kecenderungan demikian mungkin disebabkan karena peminjaman uang biasanya dilakukan dalam nilai yang cukup besar yang berarti resiko yang dihadapi pemberi pinjaman juga lebih besar. Hal ini mengingat dalam transaksi peminjaman tersebut biasanya tidak ada anggaran.

PARTISIPASI RUMAH TANGGA TANI DALAM PEMANFAATAN LEMBAGA PERKREDITAN

Di pedesaan Sulawesi Selatan lembaga pelayanan kredit memiliki peranan yang cukup penting dalam kehidupan ekonomi rumah tangga tani. Indikasi tersebut dapat

dilihat dalam Tabel 5 yang memperlihatkan bahwa hampir 50 persen responden di keenam desa penelitian memiliki pinjaman.

Pada umumnya kredit yang dipinjam petani digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Sekitar 75 persen responden melakukan pinjaman dalam bentuk sarana produksi yang disalurkan melalui KUD (Kredit Usahatani) maupun pemberi kredit non formal. Di daerah sawah, peminjaman dalam bentuk sarana produksi tersebut lebih tinggi dibandingkan di daerah lahan kering. Ini dapat dimengerti karena sistem usahatani di daerah sawah yang umumnya mengusahakan tanaman padi memang lebih intensif dalam penggunaan sarana produksi seperti pupuk.

Tabel 5. Tingkat partisipasi rumah tangga tani dalam pemanfaatan lembaga perkreditan di pedesaan Sulawesi Selatan, 1988

U r a i a n	Desa sawah irigasi	Desa sawah tadah hujan	Desa lahan kering	Total
1. Jumlah responden	96	99	94	289
2. Jumlah responden peminjam kredit	61 (63,5%)	37 (37,4%)	32 (34,1%)	130 (45,0%)
3. Jenis kredit yang di- pinjam (resp.)				
a. Sarana produksi	58 (95,1%)	25 (67,6%)	15 (45,9%)	98 (75,4%)
b. Uang	3 (4,9%)	12 (32,4%)	17 (53,1%)	32 (24,6%)
4. Sumber kredit yang digunakan (resp.)				
a. KUD/BRI	30 (49,2%)	20 (54,0%)	2 (6,3%)	52 (40,0%)
b. Lembaga non formal	31 (50,8%)	17 (45,9%)	30 (93,7%)	78 (60,0%)
5. Sumber kredit sarana produksi (resp.)				
a. KUD	30 (51,7%)	18 (72,0%)	2 (13,3%)	50 (51,0%)
b. Lembaga non formal	28 (48,3%)	7 (28,0%)	13 (86,7%)	48 (49,0%)
6. Sumber kredit dalam bentuk uang (resp.)				
a. KUD/BRI	— (0,0%)	2 (16,7%)	— (0,0%)	2 (6,3%)
b. Lembaga non formal	3 (100,0%)	10 (83,3%)	17 (100,0%)	30 (93,7%)

Sebaliknya, untuk pinjaman dalam bentuk uang cenderung lebih banyak terjadi di daerah lahan kering. Kecenderungan demikian terjadi karena di daerah lahan kering memang cukup banyak yang melakukan pinjaman uang dengan sistem ijon. Ditempuhnya sistem pinjaman tersebut tampaknya lebih didorong oleh motivasi untuk menghindari resiko harga (terutama untuk daerah sayuran) daripada desakan kebutuhan uang tunai. Hal ini mengingat sebagian besar pinjaman yang dilakukan pada akhirnya juga dipergunakan untuk pembelian sarana produksi. Dari seluruh responden peminjam uang hanya sekitar 20 persen dan 10 persen responden yang menggunakan pinjaman tersebut masing-masing untuk biaya pendidikan dan konsumsi sedangkan sisanya mengalokasikan untuk pembelian sarana produksi.

Pada umumnya peminjaman sarana produksi yang dilakukan sebagian besar berupa pupuk. Ini menandakan bahwa petani memang telah menyadari pentingnya penggunaan pupuk dalam kegiatan usahatani terutama bagi petani di daerah sawah. Sedangkan untuk daerah lahan kering peminjaman bibit yang paling banyak dilakukan petani. Peminjaman bibit tersebut terutama banyak terjadi di desa Ujung yang merupakan daerah lahan kering dengan dominasi usahatani tembakau. Bibit tembakau yang dipinjam petani biasanya berasal dari pedagang tembakau sementara KUD belum banyak berperan dalam pengadaan sarana produksi tersebut di desa Ujung.

Dilihat dari banyaknya petani yang melakukan pinjaman maka dapat dikatakan bahwa dalam pelayanan kredit pada petani, lembaga non formal lebih berperan dibandingkan KUD yang merupakan lembaga yang diprogramkan pemerintah dalam penyaluran kredit di pedesaan. Hal ini terutama untuk peminjaman dalam bentuk uang sedangkan untuk peminjaman sarana produksi peranan kedua jenis lembaga tersebut hampir berimbang. Di daerah sawah peranan KUD dalam penyaluran pinjaman sarana produksi tersebut tampak lebih besar dibandingkan daerah lahan kering. Penyaluran kredit KUD melalui KUD yang selama ini diprioritaskan untuk daerah-daerah produksi padi dalam rangka mempertahankan swasembada beras merupakan penyebab dari kenyataan tersebut.

Dalam penyediaan kredit sarana produksi, lembaga kredit non formal dapat dikatakan merupakan pelengkap KUD yang menyalurkan Kredit Usaha Tani (KUT). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pelayanan kredit sarana produksi yang dilakukan oleh lembaga kredit non formal tersebut pada umumnya banyak terjadi di daerah-daerah yang belum terjangkau pelayanan KUD. Keadaan demikian, misalnya dapat dikaji dari kasus di desa Margolembo dan Selli yang merupakan daerah sawah namun belum terjangkau pelayanan kredit KUT. Di kedua desa tersebut pelayanan kredit sarana produksi oleh lembaga non formal cukup berkembang dengan bunga yang cukup tinggi. Tetapi sebaliknya, di daerah sawah lainnya seperti desa Passeno dan Lowa yang telah terjangkau kredit KUT, lembaga kredit non formal

yang meminjamkan sarana produksi kurang berkembang. Hal ini jelas karena bunga yang dikenakan oleh lembaga kredit non formal relatif tinggi dibandingkan KUT. Kalaupun ada petani yang meminjam sarana produksi pada lembaga non formal di kedua desa tersebut pada umumnya dilakukan oleh petani berlahan sempit yang kurang asses terhadap KUD.

Yang cukup menarik, peminjaman kredit melalui KUD ternyata lebih banyak dilakukan oleh petani dengan luas pemilikan lahan yang lebih luas. Ini terutama nampak jelas untuk kasus di daerah sawah irigasi seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 6. Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa penyediaan fasilitas kredit yang disalurkan melalui KUD lebih banyak memberikan manfaat pada petani berlahan luas. Kecenderungan demikian dapat terjadi karena petani berlahan luas lebih rasional dalam melakukan pinjaman sehingga lebih banyak meminjam dari KUD yang mengenakan tingkat bunga lebih rendah dibandingkan lembaga kredit non formal. Namun sebaliknya bagi petani berlahan sempit yang cenderung lebih banyak terlibat pada peminjaman kredit melalui lembaga kredit non formal. Kenyataan tersebut senada dengan hasil analisa data Sensus Pertanian 1983 oleh Satari *et al.* (1986) yang mengungkapkan bahwa keterlibatan petani berlahan sempit dengan lembaga kredit non-formal cenderung lebih tinggi melalui sistem ijon.

Tabel 6. Persentase responden peminjam kredit berdasarkan sumber kredit yang digunakan dan luas pemilikan lahan di pedesaan Sulawesi Selatan, 1988

U r a i a n	Desa sawah irigasi	Desa sawah tadah hujan	Desa lahan kering	Total
1. Sumber kredit KUD				
(% resp.) *)				
<0,25 ha	4,8	30,8	3,0	13,5
0,25 – 0,50 ha	31,6	16,9	–	28,8
>0,50 ha	42,9	22,2	–	14,1
2. Sumber kredit non				
KUD (% resp.)				
<0,25 ha	66,7	7,7	63,7	34,3
0,25 – 0,50 ha	21,1	5,3	30,0	16,4
>0,50 ha	16,1	13,2	28,6	27,6

*) Persentase responden dari jumlah responden untuk masing-masing kelompok luasan lahan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN KETERLIBATAN PETANI DENGAN LEMBAGA PERKREDITAN

Uraian berikut mencoba menelusuri lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang mendorong petani untuk melakukan pinjaman pada lembaga perkreditan. Dalam hal ini pembahasan hanya akan difokuskan untuk petani yang melakukan pinjaman pada lembaga kredit non formal. Pertimbangan ini dilakukan mengingat keterlibatan petani dalam pemanfaatan lembaga kredit formal (terutama KUD) seringkali dikaitkan dengan program-program pemerintah. Ini berarti keterlibatan petani dalam pemanfaatan lembaga kredit tersebut belum tentu sebagai akibat dorongan kebutuhan pada petani sendiri melainkan sudah terpola sebagai akibat adanya program-program pemerintah tersebut.

Seperti yang telah disebutkan dalam metodologi penelitian, pengkajian faktor-faktor tersebut dilakukan melalui analisis fungsi logit. Hasil analisis fungsi logit tersebut disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Parameter fungsi logit pendugaan faktor-faktor yang menentukan keterlibatan rumah tangga tani dengan lembaga kredit non formal di pedesaan Sulawesi Selatan, 1988

Peubah bebas	Parameter dugaan	Elastisitas peluang
X ₁ (Umur KK)	-0.0156 (0.77)	-0.4912
X ₂ (Pendidikan KK)	-0.0141** (3.82)	-0.0401
X ₃ (Nilai asset)	-0.0003*** (5.91)	-0.4199
X ₄ (Proporsi pendapatan usahatani)	0.4394 (0.35)	0.2862
DK (Dummy keanggotaan KUD)	-1.4521* (3.06)	-0.2162
DL ₁ (Dummy daerah sawah irigasi)	-1.8627*** (8.43)	-0.4561
DL ₂ (Dummy daerah sawah tadah hujan)	-1.0497* (2.62)	-0.2709
DD (Dummy desa dilalui kendaraan umum)	-1.3439*** (8.36)	-0.6314
Konstanta	0.8231 (0.43)	
- 2 log fungsi Likelihood	140.69	
CHI-Square	79.31	
R ²	0.431	
N	226	

Keterangan: Angka dalam kurung () nilai CHI-Square

*** nyata pada taraf 1%

** nyata pada taraf 5%

* nyata pada taraf 10% - 20%.

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa model analisis yang digunakan tidak begitu baik dalam menggambarkan perilaku keterlibatan petani dalam pemanfaatan lembaga kredit non formal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R^2 yang hanya sebesar 0,431. Ini menandakan bahwa sebenarnya masih ada peubah-peubah lain yang mempengaruhi petani melakukan pinjaman pada lembaga kredit non formal namun belum tercakup di dalam model yang digunakan. Seluruh peubah yang dimasukkan di dalam model hanya mampu menerangkan sekitar 43 persen dari variasi perilaku rumah tangga tani dalam melakukan pinjaman pada lembaga kredit non formal.

Tetapi walaupun demikian, beberapa peubah yang dimasukkan di dalam model ternyata cukup mampu menerangkan pengaruhnya secara parsial. Hal ini khususnya ditunjukkan oleh peubah-peubah yang memperlihatkan adanya hubungan yang nyata. Pada taraf nyata 1 persen hingga 20 persen peubah-peubah yang mempengaruhi keterlibatan rumah tangga tani dengan lembaga kredit non formal adalah tingkat pendidikan kepala keluarga (X_1), nilai pemilikan asset (X_3), keanggotaan dalam KUD (DK), potensi lahan usahatani (DL_1 dan DL_2) dan assesibilitas desa lokasi petani (DD). Sedangkan peubah umur kepala keluarga (X_1) dan proporsi pendapatan usahatani (X_4) tidak memperlihatkan pengaruh yang nyata.

Tabel 8. Deskripsi peubah bebas yang digunakan dalam analisis fungsi logit

Peubah bebas	Notasi	Peminjam kredit	Non peminjam kredit	Total
Umur kepala keluarga (th.)	X_1	40.89	42.50	42.11
Lama pendidikan kepala keluarga (tahun)	X_2	3.65	3.85	3.80
Nilai pemilikan asset (Rp. 000)	X_3	1197.9	2088.9	1871.6
Proporsi pendapatan usahatani terhadap total pendapatan (%)	X_4	82.16	83.68	83.29
Jumlah contoh anggota KUD	DK	12	33	45
Jumlah contoh di daerah sawah irigasi	DL_1	30	44	74
Jumlah contoh di daerah sawah tadah hujan	DL_2	28	50	78
Jumlah contoh di daerah yang dilalui kendaraan umum	DD	36	106	142
Jumlah contoh responden		57	169	226

Tingkat pendidikan kepala keluarga (X_2) ternyata menunjukkan hubungan yang negatif dengan keterlibatan petani dengan lembaga kredit non formal. Ini berarti petani yang melakukan pinjaman pada lembaga kredit non formal di pedesaan Sulawesi Selatan lebih banyak yang berpendidikan rendah. Kemungkinan hal ini terjadi karena petani dengan tingkat pendidikan rendah memiliki pengetahuan yang lebih sempit dan kurang bisa menjangkau terhadap lembaga kredit formal seperti KUD. Sehingga, walaupun tingkat bunga pinjaman pada lembaga kredit non formal sebenarnya cukup tinggi namun petani berpendidikan rendah tetap cenderung melakukan pinjaman pada lembaga kredit tersebut.

Seperti yang diperlihatkan oleh hasil analisis fungsi logit, petani yang melakukan pinjaman pada lembaga kredit non formal tampaknya didorong oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Fenomena ini terlihat dari koefisien peubah nilai asset (X_3) yang bertanda negatif dan nyata pada taraf 1 persen. Ini berarti peminjaman kredit pada lembaga kredit non formal lebih banyak dilakukan oleh petani dengan tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang lebih rendah. Elastisitas peluang peubah X_3 adalah sebesar -0.4199 yang berarti apabila rata-rata nilai kepemilikan asset meningkatkan menjadi dua kali lipat maka peluang petani yang melakukan pinjaman pada lembaga kredit non formal dapat diharapkan menurun sekitar 42 persen.

Meskipun tidak nyata secara statistik, ada kecenderungan bahwa peminjaman pada lembaga kredit non formal lebih banyak dilakukan oleh petani berumur muda seperti yang ditunjukkan oleh koefisien peubah X_1 yang bertanda negatif. Demikian pula rumah tangga tani yang pendapatannya banyak tergantung dari hasil usahatani cenderung melakukan pinjaman pada lembaga kredit non formal. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien peubah X_4 yang bertanda positif. Hubungan demikian dapat terjadi karena: (1) penghasilan dari usahatani agaknya belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga tani baik untuk kegiatan produksi maupun konsumsi dan (2) penghasilan dari usahatani bersifat musiman sementara kebutuhan rumah tangga tani bersifat kontinyu.

Namun demikian, hubungan antara keragaman sumber pendapatan (X_4) dengan perilaku peminjaman kredit pada lembaga kredit non formal seperti disebutkan di atas tidak selamanya benar. Kemungkinan hal ini terjadi karena walaupun pendapatan rumah tangga tani sepenuhnya berasal dari hasil usahatani namun arus penerimaan yang diperoleh petani dapat saja relatif kontinyu selama tanaman yang diusahakan merupakan jenis-jenis tanaman berumur pendek. Kasus seperti ini misalnya banyak terjadi di desa Baroko. Di desa tersebut yang merupakan daerah lahan kering pada umumnya petani menerapkan sistem usahatani tumpangsari dengan jenis-jenis tanaman berumur pendek seperti kubis (berumur 2 bulan) dan daun bawang.

Sebagaimana diduga sebelumnya, kesertaan petani dalam keanggotaan KUD agaknya telah mengekang keterlibatannya dengan lembaga kredit non formal. Hubungan demikian dapat dimengerti karena pinjaman yang dilakukan petani pada lembaga kredit non formal umumnya berupa sarana produksi dan untuk jenis pinjaman tersebut, petani peserta KUD jelas lebih menguntungkan bila meminjam pada KUD. Kenyataan ini menandakan bahwa dalam penyediaan kredit sarana produksi lembaga kredit non formal merupakan pesaing bagi KUD yang menyalurkan Kredit Usaha Tani (KUT). Dengan demikian berkembangnya lembaga kredit non formal di pedesaan Sulawesi Selatan sebenarnya dapat lebih dikendalikan apabila KUD mampu memberikan pelayanan kredit yang dibutuhkan petani.

Di daerah dengan sistem pengairan yang lebih baik, peminjaman pada lembaga kredit non formal oleh petani cenderung lebih sedikit. Koefisien peubah DL_1 dan DL_2 yang bertanda negatif mengungkapkan hal tersebut. Keadaan demikian terutama tampak jelas bila dibandingkan antara daerah sawah irigasi dan daerah lahan kering. Kecenderungan demikian agaknya lebih disebabkan karena lembaga pelayanan kredit formal seperti: KUD atau BRI Unit Desa lebih berkembang di daerah-daerah dengan sistem irigasi yang lebih baik. Hal ini mengingat penyaluran fasilitas kredit KUT yang dilakukan oleh KUD dan BRI sejauh ini memang lebih diprioritaskan dalam rangka mempertahankan swasembada beras.

Di daerah-daerah dengan aksesibilitas rendah terhadap lembaga pelayanan, lembaga kredit non formal agaknya lebih berkembang dan banyak dimanfaatkan oleh petani. Keadaan demikian dapat dimengerti karena lembaga kredit formal pada umumnya hanya ditempatkan di lokasi-lokasi dengan sarana transportasi yang cukup baik seperti kota kecamatan. Demikian pula perdagangan sarana produksi seperti pupuk dan obat-obatan pada umumnya hanya terpusat di pasar-pasar kecamatan. Keadaan demikian, pada akhirnya menyebabkan petani yang berlokasi di daerah-daerah dengan aksesibilitas rendah banyak terlibat dengan lembaga kredit non formal baik untuk pinjaman uang maupun sarana produksi sebagai akibat terbatasnya alternatif yang dapat dilakukan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKSANAAN

Pemanfaatan lembaga pelayanan kredit ternyata cukup meluas di pedesaan Sulawesi Selatan. Ini menandakan bahwa kehadiran lembaga pelayanan tersebut memang cukup dibutuhkan petani. Pada umumnya pinjaman yang dilakukan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Sebagian besar petani bahkan melakukan pinjaman langsung dalam bentuk sarana produksi seperti bibit, obat-obatan dan terutama adalah pupuk.

Lembaga yang melayani pinjaman pada petani lebih banyak dilakukan oleh lembaga perkreditan non formal, sedangkan KUD yang merupakan lembaga perkreditan yang diprogramkan pemerintah untuk daerah pedesaan terutama hanya berperan di daerah sawah. Ada kecenderungan lembaga tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh petani berlahan luas dan sebaliknya untuk lembaga kredit non formal. Di daerah sawah peranan KUD juga tidak dominan tetapi hampir berimbang dengan lembaga kredit non formal khususnya dalam pelayanan kredit sarana produksi. Dalam pelayanan jenis kredit ini, lembaga kredit non formal dapat dikatakan merupakan pelengkap bagi KUD mengingat peminjaman kredit pada lembaga kredit non formal tersebut pada umumnya dilakukan oleh petani yang kurang asses terhadap KUD yang menyalurkan kredit KUT. Sedangkan untuk pinjaman uang lembaga kredit non formal justru lebih berperan dibandingkan KUD.

Pada umumnya pelayanan kredit non formal di pedesaan Sulawesi Selatan dilakukan oleh pedagang desa atau pemilik penggilingan padi khususnya di daerah sawah. Dibandingkan dengan lembaga perkreditan formal seperti KUD atau BRI-UNDES, suku bunga yang berlaku pada lembaga kredit non formal jauh lebih tinggi. Untuk pinjaman dalam bentuk uang suku bunga yang dikenakan lembaga kredit non formal lebih tinggi dibandingkan pinjaman dalam bentuk sarana produksi. Hal ini karena pinjaman dalam bentuk uang biasanya dilakukan dalam jumlah besar sehingga resiko yang dihadapi pemberi kredit juga besar karena dalam transaksi pemberian kredit tidak ada anggunan.

Pada umumnya peminjaman kredit yang dilakukan petani disebabkan oleh kurangnya penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Petani dengan tingkat pendidikan rendah juga cenderung lebih banyak yang melakukan pinjaman pada lembaga kredit non formal. Keterbatasan alternatif sumber pinjaman yang dapat dihubungi juga merupakan salah satu penyebab lembaga kredit non formal banyak dimanfaatkan petani. Sedangkan ketergantungan petani terhadap hasil usahatani sebagai sumber penghasilan utama tidak selamanya menjadi faktor pendorong dilakukannya pinjaman. Hal ini karena kontinuitas penerimaan pada petani yang hanya mengandalkan penghasilannya dari hasil usahatani juga sangat tergantung pada umur tanaman dan sistem usahatani yang diterapkan.

Mengingat cukup pentingnya peranan lembaga pelayanan kredit di pedesaan Sulawesi Selatan kiranya cukup beralasan apabila pelayanan kredit dengan suku bunga rendah lebih diperluas dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi di daerah pedesaan. Ini berarti peranan KUD sebagai salah satu lembaga pelayanan kredit yang diprogramkan pemerintah untuk daerah pedesaan dituntut lebih jauh. Dalam kaitan ini persoalannya jelas sangat kompleks, baik akibat masalah-masalah intern yang dihadapi KUD sendiri maupun masalah-masalah yang berada di luar

jangkauan KUD. Namun paling tidak perpanjangan tangan KUD di daerah pedesaan sangat diperlukan meskipun lembaga tersebut dapat saja ditempatkan di kota-kota kecamatan. Usaha perluasan jangkauan pelayanan tersebut perlu dilakukan mengingat faktor jarak ke tempat KUD agaknya merupakan salah satu kendala yang cukup serius bagi petani untuk berhubungan dengan lembaga tersebut.

Faktor lain yang perlu lebih dikembangkan dalam rangka perluasan pelayanan kredit oleh KUD adalah dalam sistem pengembalian kredit. Dibandingkan dengan lembaga kredit non formal, sistem pengembalian kredit yang diterapkan oleh KUD tidak lebih memudahkan bagi petani. Dalam sistem pengembalian kredit mungkin perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang kemungkinan dilakukannya pengembalian kredit dalam bentuk hasil produksi. Dengan sistem pengembalian tersebut paling tidak akan mengurangi beban petani karena petani tidak harus menjual produksinya lebih dahulu disamping juga guna melindungi petani dari permainan harga yang dilakukan oleh pedagang. Sedangkan bagi KUD sendiri, penerapan sistem pengembalian tersebut juga berdampak positif apabila dikaitkan dengan fungsi KUD sebagai suatu unit usaha yang bergerak di bidang pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasryno, F., 1984. Development of Agriculture and Farm Credit Scheme. APO, Tokyo.
- Kuntjoro, 1983. Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Kembali Kredit Bimas Padi. Studi Kasus di Kabupaten Subang, Jawa Barat. IPB, Bogor.
- Loins, A. dan S. Karimi, 1987. Pengembangan Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan di Sumatera Barat. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Jakarta.
- Mosher, A.T., 1966. Getting Agriculture Moving. Frederick. A & Pragur, Inc. Boston.
- Mubyarto, L. Sutrisno dan G. Sumodiningrat, 1984. Kredit Pedesaan dan Peranannya Dalam Penciptaan Peluang Bekerja dan Peluang Berusaha. Makalah Seminar Nasional Peluang Kerja dan Peluang Berusaha di Pedesaan. P₃PK UGM, Yogyakarta.
- Partadiredja, A., 1984. Kredit Desa: Sistem Ijon. *Didalam*. F. Wijaya dan S. Hadiwigeno, 1984. Untaian Ekonomi Moneter dan Perbankan. Kumpulan Bacaan Terpilih. BPEE. Yogyakarta.
- Soentoro dan S. Bahri, 1988. Dampak Program Pembangunan Pertanian Terhadap Tenaga Kerja. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan Sulawesi Selatan. Pusat Agro Ekonomi, Bogor.
- Satari, G., M. Rachmat, A. Nasution dan F. Kasryno, 1986. Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan *didalam*: Sensus Pertanian 1983. Buku 3. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Tatuh, J., 1986. Kredit Untuk Konservasi Tanah dan Pengembangan Usahatani Lahan Kering di Bagian Hulu DAS Citanduy. Tesis EPS-IPB, Bogor.